

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik adalah sebuah proses pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas budaya politik dikalangan masyarakat. Tanpa adanya pemahaman politik yang baik dari masyarakat, dikhawatirkan praktik politik praktis yang tidak sehat akan terjadi dan masyarakat akan buta terhadap politik. Terlebih sekarang ini banyak sekali masyarakat yang masih buta terhadap pendidikan politik, masyarakat sekarang kerap berpikir bahwa politik itu hanya urusan pemerintah dan elit-elit tertentu. Dampak dari sikap apatis tersebut adalah banyak dari mereka yang gampang untuk dibohongi pada saat pemilu, banyak mereka yang sekadar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkontestasi (Daud : 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan tentang fungsi dari partai politik itu sendiri, yaitu pendidikan politik. Partai politik bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran terhadap warga negara dalam memahami dan mempunyai hak atas politik. Terlebih dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini, pendidikan politik sangat diperlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi sendiri bukan hanya membuat politik di suatu negara menjadi stabil, namun juga memberikan harapan baru. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan melalui perubahan-perubahan sikap politik seseorang saja, tetapi bisa juga dapat mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui institusi kemasyarakatan maupun lembaga politik yang memiliki tugas dan tujuan masing-masing.

Partai politik mempunyai tugas utama, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang berpolitik yang didasari dengan transparansi terkait personal calon yang akan masyarakat pilih pada pemilu. Dalam pemahaman mengenai partai politik, hal yang paling penting dalam memahaminya ialah partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang usianya telah dinyatakan sebagai calon daftar pemilih agar ikut andil dalam melakukan proses pemilihan umum. Kemudian memahami pula akan berartinya suara mereka yang akan merubah nasib untuk beberapa dekade tentu saja dengan pengharapan dapat memunculkan masyarakat-masyarakat yang berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan politik (Firmansyah : 2008).

Partai politik ataupun partai politik lokal tidak terlepas dengan pemahaman pendidikan politik, pendidikan politik disini terbagi menjadi 2 (dua) sektoral yang mana dibagi untuk kader Partai dan juga bagi masyarakat luas. Namun dalam penelitian ini pendidikan politik bagi masyarakat, pelaksanaan pendidikan politik merupakan hal yang penting dilakukan dan menjadi salah satu fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik (Muhtahar : 2016).

Kedudukan partai politik bukan hanya sebatas mengikuti pelaksanaan Pemilu sebagai partai peserta Pemilu, melainkan partai politik memiliki peranan sebagai wadah sosialisasi politik atau *instrumen of political socialization*. Sehingga pentingnya suatu pendidikan politik (*polical education*) bagi Warga Negara. Dengan pendidikan politik dapat mendorong warga negara untuk memiliki pengetahuan yang baik terhadap politik yang ada dinegaranya. Dalam partai politik pelaksanaan pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Dimana partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari

budaya politik, disebabkan keberadaan struktur politik didalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga media masa yang kritis dan aktif (Daud : 2019).

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tepatnya dalam Pasal 34 ayat 3 (b) ditegaskan bahwa partai politik memberikan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik agar lebih baik dan lebih maksimal lagi.

Pendidikan politik juga terdapat dalam Undang-undang pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang mewajibkan partai politik Lokal juga memberikan pendidikan politik kepada kader dan juga masyarakat. Seperti yang tertera pada Pasal 79 (a) yang mengatakan bahwa Partai politik Lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Serta pada pasal 81 (e) yang mengatakan bahwa partai politik lokal berkewajiban melakukan Pendidikan Politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Pelaksanaan pendidikan politik juga diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017, dalam pasal 267 dikatakan bahwa kampanye pemilu bagian dari pendidikan politik baik bagi kader serta masyarakat yang diberikan dalam kampanye.

Provinsi Aceh memiliki sebuah keistimewaan berupa otonomi khusus serta diperbolehkan untuk mendirikan partai politik lokal, fungsi dari partai politik lokal tidak jauh berbeda dari partai politik pada umumnya. Hingga saat ini, partai politik lokal telah banyak didirikan oleh masyarakat Aceh. Eksistensi dari partai

politik lokal Aceh sangat tinggi dikalangan masyarakat Aceh, maka seharusnya setiap partai politik lokal mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen.

Terdapat 6 partai lokal Aceh yang mengikuti Pemilu tahun 2009 yang diantaranya Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Aceh Suara Independen Rakyat Aceh. Pada Pemilu tahun 2019 hanya ada 4 partai lokal Aceh yang mengikuti pemilu, yaitu ada Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh. Untuk pemilu 2024 mendatang, setidaknya ada 6 partai yang terdiri dari Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha'at dan Taqwa.

Berikut perolehan kursi di DPRK Bireuen dalam pemilu sebelumnya :

Tabel 1.1. Perolehan Kursi Partai Politik di DPRK Bireuen

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode	
		2014-2019	2019-2024
1	<u>PKB</u>	0	1
2	<u>Gerindra</u>	1	1
3	<u>Golkar</u>	4	7
4	<u>NasDem</u>	3	2
5	<u>PKS</u>	4	4
6	<u>PPP</u>	4	4
7	<u>PAN</u>	3	2
8	<u>Demokrat</u>	2	4
9	<u>Partai Aceh</u>	13	9
10	<u>PDA</u>	1	2
11	<u>PNA</u>	5	4
Jumlah Anggota		40	40
Jumlah Partai		10	11

Sumber : KIP Kabupaten Bireuen

Berdasarkan perolehan kursi DPRK Bireuen diatas, dapat kita lihat bahwa partai lokal memiliki perolehan kursi di DPRK Bireuen semenjak pemilu tahun 2009 yang lalu. Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal Aceh yang memiliki perolehan kursi terbanyak di DPRK Bireuen semenjak awal mula keikutsertaan Partai Aceh dalam pemilu. Tentunya, partai Aceh memiliki pendukung yang besar di Kabupaten Bireuen. Maka, sudah seharusnya Partai Aceh mampu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, ditemukan fakta bahwa masih terdapatnya masyarakat yang tidak paham akan politik atau demokrasi. Sejauh ini, penulis melihat bahwasanya kehadiran Partai Aceh sangat diapresiasi oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen, Partai Aceh memiliki massa yang sangat besar dikalangan masyarakat Bireuen. Tentunya, kita berharap Partai Aceh mampu untuk membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat khususnya mengenai peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat Bireuen.

Melalui gambaran diatas, untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan politik masyarakat sudah seharusnya pendidikan politik dilakukan oleh partai politik lokal. Partai Aceh memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bahkan pemberian pendidikan politik dapat dilaksanakan melalui simbol (Interaksionisme Simbolik). Tujuan dari penggunaan simbol ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami pendidikan politik, seperti halnya simbol anti golput atau anti money politik. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pendidikan Politik Pada Partai Politik Lokal di Kabupaten Bireuen (Studi Interaksionisme Simbolik Partai Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen melalui intraksionisme simbolis?
2. Bagaimana dampak pendidikan politik oleh Partai Aceh menggunakan intraksionisme simbolis di Kabupaten Bireuen?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berfokus terhadap fenomena pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen melalui intraksionisme simbolis.
2. Penelitian ini juga berfokus terhadap dampak pendidikan politik oleh Partai Aceh menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bireuen.
3. Penelitian ini berfokus terhadap analisis interaksionisme simbolis dari pendidikan politik oleh partai politik lokal di Kabupaten Bireuen.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fenomena pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dampak pendidikan politik oleh Partai Aceh menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui analisis interaksionisme simbolis dari pendidikan politik oleh partai politik lokal di Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

1. Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang “Pendidikan Politik Interaksionisme Simbolis Pada Partai Politik Lokal (Studi Kabupaten Bireuen). Serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi disiplin Ilmu Politik dalam rangka melihat kebijakan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan fenomena serta dampak dari pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Aceh kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen melalui intraksionisme simbolis.

b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti. Peneliti juga berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bireuen.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi kebijakan politik mengenai pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh partai politik untuk masyarakat.